

SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO

Ade Maulidya

Magister Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Lampung

Email: ademauidya1@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this article is to describe the synergy of stakeholders in waste management in Metro Cities. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that: (1) waste management in metro city involves five elements, namely: government, civil society, business actors, academics and the media. Cooperation between stakeholders has been going well, but not all stakeholders involved in waste management carry out their roles optimally; (2) communication and coordination is still lacking, as indicated by several complaints from the public; (3) lack of public awareness of waste management in Metro City. Research recommendation: in increasing synergy, it is necessary to evaluate the cooperation between stakeholders. It is hoped that DLH can improve communication and coordination of waste management. Increase waste management activities and increase activities through online media which are expected to increase public awareness of the importance of managing waste.

Keywords: Synergy, Stakeholder, Waste Management

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di kota metro. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan sampah di kota metro sudah melibatkan lima elemen, yaitu: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media. Kerjasama antar *stakeholder* sudah berjalan dengan baik, namun tidak semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjalankan perannya secara optimal; (2) komunikasi dan Koordinasi masih kurang, ditunjukkan dengan masih adanya beberapa keluhan dari masyarakat; (3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro. Rekomendasi penelitian: dalam meningkatkan sinergitas perlu dilakukan evaluasi terkait kerjasama antar *stakeholder*. Diharapkan DLH dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi pengelolaan sampah. Meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah dan meningkatkan aktivitas melalui media online yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah.

Kata Kunci: Sinergitas, pemangku kepentingan, pengelolaan sampah.

PENDAHULUAN

Kota Metro merupakan kota terbesar kedua setelah Bandar Lampung dan menjadi salah satu kota tujuan perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Kota Metro setiap tahun semakin meningkat, hal tersebut akan berdampak pula pada produksi sampah di Kota Metro yang setiap hari semakin meningkat. Tidak heran jika fokus utama pemerintah daerah Kota Metro adalah mengatasi persoalan sampah dan menjaga lingkungan Kota Metro tetap bersih dan sehat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatasi persoalan sampah Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Metro mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia.

Permasalahan sampah di Kota Metro mengakibatkan timbulan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Karangrejo, Metro Utara. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran beberapa masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, tingkat pelayanan persampahan yang masih rendah, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat, peningkatan timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan peningkatan

sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta besarnya biaya pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, sampai pada pembuangan sampah di TPA Karang Rejo, Metro Utara. Pengelolaan sampah di Kota Pariaman (Sumatera Barat) dipengaruhi oleh produksi kompos, tingkat pendidikan lingkungan masyarakat, biaya retribusi sampah, jumlah Bank Sampah, Jumlah TPST3R dan nilai ekonomi sampah, cakupan layanan persampahan, dan pola sanitary landfill di TPA (Agung, 2016).

Perda Kota Metro No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Metro dalam mencapai tujuan pengelolaan persampahan agar lebih optimal. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro melakukan upaya pembentukan dan pembinaan Bank Sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengelolaan sampah baru di tingkat masyarakat dengan mengajarkan masyarakat untuk memisahkan sampah mereka dan memberikan nilai lebih ekonomis kepada sampah (Meutia, 2017). Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemudian, Kartiko (2017) berpendapat bahwa Pemda Kota Metro terus berupaya bersama-sama dengan *stakeholders* khususnya dalam dunia industri (produsen, importir, distributor, retailer, penjual) untuk menerapkan

extended producer responsibility (EPR) dalam pengelolaan sampah.

Kesadaran beberapa kelompok masyarakat yaitu seperti Mahasiswa IAIN di Kota Metro dengan mendirikan Bank Sampah, kelompok masyarakat peduli sampah, adanya Gerakan Pungut Sampah (GPS) dan tagar #sayangimetro merupakan sebuah gerakan baik untuk lingkungan, kemudian adanya Jumat bersih setiap Jumat dan jalan sehat. Menurut Hernawan, (2004) tidak terlepas dari perkembangan masyarakat dan pengelolaan publik yang tidak didominasi oleh negara (*state*) dan sektor pasar (*market*), namun membuka ruang yang luas untuk melibatkan berbagai aktor dari kalangan *civil society*. Sehingga interaksi yang terjadi pun tidak sebatas pada implementasi dan keberhasilan program, tetapi lebih jauh terhadap interaksi kontrol atau mekanisme *check and balances*.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Metro berharap agar lima aktor *pentahelix* yaitu pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media selalu bersinergi serta bersimbiosis mutualisme dalam pengelolaan sampah. Pemda senantiasa mendorong masyarakat untuk bersama-sama secara aktif berperan serta dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Metro. Dengan keterlibatan lima aktor *Pentahelix* tersebut, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian terkait sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Metro

METODE

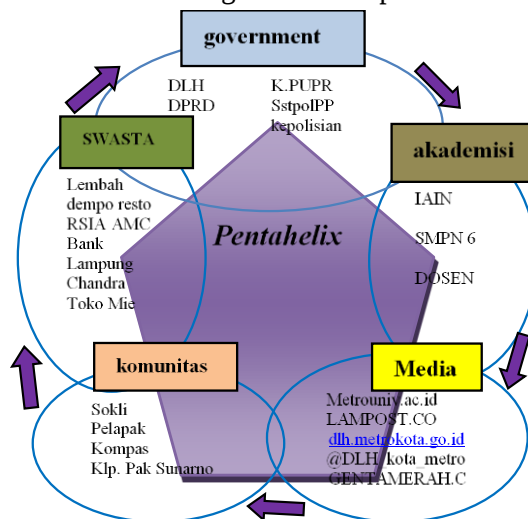
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Metro. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Metro, yaitu a) peran lima aktor *pentahelix* yaitu pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media dalam sinergitas *stakeholder* pengelolaan sampah di Kota Metro. Kemudian menggunakan indikator sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, yaitu b) komunikasi, indikator komunikasi yaitu: komunikasi yang berorientasi pada sumber dan komunikasi yang berorientasi pada penerima; c) koordinasi, indikatornya adalah hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang efektif (d) hambatan sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Metro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Stakeholder

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa aktor yang terlibat dalam sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Metro terdiri dari lima elemen, yaitu pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media.

Gambar 1. *Pentahelix* Pengelolaan Sampah di Kota Metro



Sumber: Hasil penelitian, 2020.

Aktor yang terlibat dari elemen pertama, yaitu pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, DPRD, SatpolPP, Kepolisian.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran masing-masing aktor adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Peran Pemerintah

No.	Aktor	Peran	Sinergi
1.	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan himbauan, sosialisasi, pemberian fasilitas sarana dan prasarana. Memotivasi serta mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Membentuk Bank sampah	Berjalan dengan baik.
2.	DPRD	Mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Pemberian fasilitas berupa 5 (lima) bentor dan mobil <i>pick up</i> .	Berjalan dengan baik.
3.	Kementerian PUPR	Pembangunan TPST di kelurahan Yosodadi, Sumber sari. Pemberian fasilitas alat pengomposan, dua bentor dan mesin pencacah plastic.	Berjalan dengan baik.
4.	Satpol PP	Penegakkan peraturan dan penertiban wilayah, khususnya dalam melakukan OTT pada oknum pembuang sampah sembarangan, di sungai maupun perbatasan wilayah.	Berjalan dengan baik.
5.	Kepolisian	Penggunaan fasilitas DLH berupa program JAS yaitu bekerjasama dalam pembuangan sampah hasil penghancuran barang bukti, sampah gudang makanan yang telah kadaluarsa.	Berjalan dengan baik.

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Elemen kedua yaitu masyarakat (*civil society*) komunitas, yang terdiri dari system koperasi lingkungan (sokli), kompas (kelompok pemuda purwoasri),

kelompok masyarakat Pak Sunarno. Berikut merupakan peran masing-masing aktor:

Tabel 2. Peran masyarakat

No.	Aktor	Peran	Sinergitas
1.	Klp. Pak Sunarno	Mengelola sampah menjadi kompos.	Berjalan dengan baik.
2.	KOMPAS (Komunitas Pemuda Purwoasri)	Melakukan pencacahan sampah plastic.	Berjalan dengan baik.
3.	SOKLI (Sistem Koperasi Lingkungan)	Kelompok Pengangkut sampah di beberapa RW Kota Metro.	Berjalan dengan baik.
4.	Pelapak	Masyarakat pengumpul sampah yang masih laku dijual dari kardus dan botol minum mineral.	Berjalan dengan baik.

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Faktor pendukung sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Metro adalah adanya keterlibatan pihak swasta atau dunia usaha dalam pengelolaan sampah.

Elemen ketiga pelaku usaha adalah Lembah Dempo Resto, RSIA AMC, Bank Lampung, Chandra dan toko mie. Berikut merupakan peran masing-masing aktor:

Tabel 3. Peran Pelaku Usaha

No.	Aktor	Peran	Sinergitas
1.	Lembah Dempo Resto	Melakukan pemilahan sampah secara mandiri dan mengelola dampak usahanya termasuk sampah. Melakukan pembayaran retribusi sampah tiap bulan.	Berjalan dengan baik.
2.	RSIA AMC	Melakukan prosedur pembuangan sampah medis yang baik dan benar. Pemberian fasilitas Bentor pada Bank sampah Cangkir Hijau.	Berjalan dengan baik.
3.	Bank Lampung	Pemberian fasilitas bentor pada beberapa bank sampah seperti Imopuro, Rejomulyo, wijayakusuma dan yosomulyo.	Berjalan dengan baik.
4.	Chandra	Pemberian fasilitas bentor kepada beberapa bank sampah seperti Ganjar Agung, Permata dan Yosodadi	Berjalan dengan baik.
5.	Toko Mie Ayam	Melakukan pemilahan sampah secara mandiri dan mengelola dampak usahanya termasuk sampah. Melakukan pembayaran retribusi sampah tiap bulan.	Berjalan dengan baik.

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Elemen keempat adalah akademisi yang terdiri dari: IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kota Metro, dosen, SMP N 6

Metro dengan peran masing-masing aktor yaitu:

Tabel 4. Peran Akademisi

No.	Aktor	Peran	Sinergitas
1.	IAIN (Institut Agama Islam Negeri)	Pembentukan Bank sampah, pemanfaatan air lindi, pembuatan kompos.	Berjalan dengan baik
2.	SMP N 6 Kota Metro	Adanya tim khusus untuk pengelolaan bank sampah.	Berjalan dengan baik
3.	Dosen IAIN	Bekerjasama dan sebagai konsultan dengan pihak DLH dalam penanganan sampah.	Berjalan dengan baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Keberadaan media ikut berpengaruh dalam penyebaran informasi. Aktor masing-masing yang terlibat yaitu:

Tabel 5. Peran Media

No.	Aktor	Peran	Sinergitas
1.	@dlh_kota_metro (facebook dan instagram)	update kegiatan melalui media sosial.	Berjalan dengan baik.
2.	dlh.metrokota.go.id	update informasi melalui website resmi	Berjalan dengan baik.
3.	Lampost.co	Publikasi informasi media cetak/online.	Berjalan dengan baik.
4.	Gentamerah.com	Publikasi informasi media cetak/online.	Berjalan dengan baik.
5.	Metrouniv.ac.id	Publikasi informasi melalui website IAIN Metro	Berjalan dengan baik.

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Sinergitas akan berjalan dengan baik jika terbangun komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam sebuah program dan atau kebijakan (Mulyana, 2008; Aditya, 2014; Dwinugraha, 2017). Komunikasi yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat, pelaku usaha dan media kurang begitu efektif dan interaktif sehingga masih bersifat satu arah. Tidak terjadi timbal balik dari masyarakat, pelaku usaha dan media. Masyarakat dan pelaku usaha hanya melaksanakan tugas yaitu mengelola sampahnya secara mandiri. Hanya saja beberapa bank sampah yang aktif yang melakukan komunikasi secara rutin pertahun. Sosialisasi yang dilakukan

untuk pengelolaan sampah juga masih kurang.

Koordinasi yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, bank sampah, akademisi, pelaku usaha maupun media berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan diantaranya terkait sub indikator hubungan langsung, perencanaan awal, perumusan wewenang dan tanggungjawab serta komunikasi yang efektif dari pihak Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat, bank sampah maupun pelaku usaha.

Hambatan sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Metro.

- a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b) Menjalankan sinergitas dalam pengelolaan sampah di Kota Metro membutuhkan penegakkan hukum, selama ini penegakkan hukum kurang berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
- c) Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah kreatifitas.
- d) Kurangnya komunikasi dan pemberitahuan DLH dalam pemberian informasi terkait retribusi sampah.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sampah di Kota Metro sudah melibatkan lima elemen, yaitu: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media. Secara umum kerjasama antar *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Metro sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, tidak semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro melaksanakan perannya secara optimal. Komunikasi (sosialisasi, edukasi dan pendampingan) dan koordinasi (perumusan wewenang dan tanggungjawab) yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat masih kurang, Peneliti menyarankan pihak DLH untuk mengoptimalkan model *pentahelix* pengelolaan sampah di Kota Metro,

maka perlu dilakukan evaluasi terkait kerjasama antar *stakeholder*. Kemudian DLH dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi seperti sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat Kota Metro dalam perumusan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan sampah di Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, B. R. (2014). Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).
- Agung, N. (2016). *Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Dengan Pendekatan Model Sistem Dinamis di Kota PARIAMAN, Sumatera Barat*. Masters thesis, Universitas Andalas.
- Dwinugraha, A. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (1). pp. 1-7.
- Hernawan, D. (2004). Akuntabilitas NGO dan Kontrol Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2). pp. 158–169.

- Kartiko, Y. N. (2017). Strategi Pemerintah Kota Metro dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota yang Berkelanjutan. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 4(2). pp. 156-169.
- Meutia, I. F. (2017). *Waste Bank: The Strategy and Community-Based Environmental Governance. 2nd SHIELD 2017*. 244.
- Mulyana, S. (2008). *Sinergitas dan Kemitraan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Jawa*.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.